



## Kebijakan Administrasi Keimigrasian Dan Psikologi Sosial: Dampak Sosial Dan Psikologis Pada Imigran Dan Masyarakat Lokal

Avelia Ariska Vio Elvara<sup>1</sup>, Imma Yedida Ardi<sup>2</sup>, Agung Sulisty Purnomo<sup>3</sup>

Politeknik Pengayoman Indonesia<sup>123</sup>

---

Received:	05 Oktober 2025	<b>Abstrak</b>
Revised:	17 Oktober 2025	<i>Jurnal ini membahas pengaruh kebijakan administrasi keimigrasian di Indonesia terhadap kondisi psikologis dan dinamika sosial antara imigran dan masyarakat lokal. Melalui kajian literatur, penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan keimigrasian yang inklusif dapat meningkatkan integrasi sosial dan kesejahteraan psikologis imigran, sedangkan kebijakan yang restriktif dan diskriminatif berpotensi menimbulkan stres, kecemasan, dan isolasi sosial. Dampak kebijakan tersebut juga terlihat pada persepsi dan sikap masyarakat lokal terhadap imigran, di mana kebijakan eksklusif cenderung memperkuat prasangka dan ketegangan sosial. Studi ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan yang responsif terhadap konteks sosial dan psikologis untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif di Indonesia.</i>
Accepted:	28 Oktober 2025	<b>Kata Kunci:</b> Kebijakan Keimigrasian; Psikologi Sosial; Imigran.

(\*) Corresponding Author: [kt.santi.indriani@unud.ac.id](mailto:kt.santi.indriani@unud.ac.id), [avelariska@gmail.com](mailto:avelariska@gmail.com)

**How to Cite:** Elvara, A., Ardi, I., & Purnomo, A. (2025). Kebijakan Administrasi Keimigrasian Dan Psikologi Sosial: Dampak Sosial Dan Psikologis Pada Imigran Dan Masyarakat Lokal. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11.B), 26-36. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11927>.

---

### PENDAHULUAN

Fenomena keimigrasian di Indonesia memiliki akar yang dalam pada sejarah migrasi paksa sebelum tahun 1965, yang membentuk pola-pola migrasi kontemporer baik yang bersifat paksa maupun sukarela. Urbanisasi pasca-kemerdekaan Indonesia juga dipengaruhi oleh migrasi paksa, yang menciptakan jaringan migrasi berantai antara daerah asal dan tujuan. Fenomena ini turut memengaruhi ketimpangan politik, ekonomi, dan sosial yang terus berlanjut hingga kini (Hugo, 2006).

Sebagai negara yang terletak di persimpangan Asia dan Australia, Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai jalur utama bagi pergerakan imigran dari berbagai belahan dunia. Indonesia sering menjadi negara transit maupun tujuan akhir bagi imigran, pencari suaka, dan pengungsi, yang semakin memperburuk tantangan sosial-ekonomi, seperti penyerapan penduduk, lapangan pekerjaan, dan pemerataan distribusi sumber daya (Bayu Setyaji et al., 2023). Hal ini menambah kompleksitas pengelolaan keimigrasian, yang semakin memerlukan reformasi regulasi dan koordinasi antar-*stakeholder*, serta kerja sama multilateral untuk mendukung stabilitas nasional dan kepentingan strategis Indonesia (Prasetyo et al., 2024).

Kebijakan administrasi keimigrasian Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Pemerintah melalui pengawasan terhadap orang asing yang masuk dan tinggal di Indonesia dapat mencegah potensi ancaman terhadap stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pengawasan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang pemberian izin masuk, keberadaan, dan aktivitas orang asing di Indonesia (Dani, 2020). Penerapan prinsip *selective policy* keimigrasian hanya mengizinkan orang asing yang bermanfaat bagi negara dan tidak membahayakan keamanan serta ketertiban umum, yang

tercermin dalam pemeriksaan ketat di titik imigrasi untuk mencegah perdagangan manusia dan pelanggaran keimigrasian lainnya (Sianturi, 2021).

Selain itu, kebijakan administrasi keimigrasian memberikan kewenangan kepada petugas imigrasi untuk menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggar izin tinggal, seperti deportasi dan pencekalan. Sanksi-sanksi ini terbukti efektif dalam menegakkan hukum keimigrasian dan menjaga ketertiban nasional (Akbar, 2016). Namun, penting untuk mencatat bahwa kebijakan keimigrasian juga berdampak langsung pada kesejahteraan psikologis dan hubungan sosial antara imigran dan masyarakat lokal. Kebijakan yang inklusif atau eksklusif dapat memengaruhi integrasi sosial, penerimaan budaya, serta potensi munculnya ketegangan atau harmoni sosial (Ashura, 2021).

Kebijakan yang mendukung integrasi sosial, seperti penyediaan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum, dapat membantu imigran membangun rasa aman dan kepercayaan diri dalam masyarakat baru mereka. Sebaliknya, kebijakan yang ketat atau diskriminatif, seperti pembatasan akses layanan atau ancaman deportasi, dapat meningkatkan rasa takut, ketidakpercayaan, dan memperburuk masalah kesehatan mental, yang akhirnya menghambat integrasi sosial dan ekonomi mereka (Torres et al., 2018). Oleh karena itu, kebijakan yang jelas dan koheren sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif, serta mencegah isolasi sosial bagi imigran (Sablonnière et al., 2020).

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kebijakan administrasi keimigrasian memengaruhi psikologi sosial imigran?
2. Bagaimana hubungan antara kebijakan administratif dan persepsi sosial masyarakat terhadap imigran?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **a. Teori Administrasi Keimigrasian**

#### **1. Teori Pendekatan Multi-Paradigma**

Menurut Meyers (2000), kebijakan administrasi keimigrasian dapat dianalisis melalui berbagai pendekatan teori yang masing-masing memberikan pemahaman yang berbeda mengenai alasan dan dampak kebijakan tersebut. Pendekatan Marxisme menekankan pada aspek ekonomi dan kelas sosial, di mana kebijakan imigrasi sering kali dipandang sebagai cara untuk mengatur aliran tenaga kerja guna memenuhi kebutuhan pasar atau menjaga kekuasaan ekonomi antara negara kaya dan miskin. Di sisi lain, Realisme yang berfokus pada keamanan negara, melihat kebijakan imigrasi sebagai upaya untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional dengan mempertimbangkan ancaman yang mungkin datang dari individu atau kelompok yang masuk tanpa pengawasan yang ketat.

Sementara itu, Liberalisme menekankan hak individu dan pasar tenaga kerja, di mana kebijakan imigrasi harus memberikan kesempatan kepada individu untuk mencari kehidupan yang lebih baik serta mendorong arus tenaga kerja yang bebas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dari perspektif identitas nasional, kebijakan imigrasi dipandang sebagai sara untuk melindungi budaya dan menjaga identitas nasional dari pengaruh luar. Selain itu, pendekatan politik domestik melihat kebijakan imigrasi sebagai hasil dari interaksi antara berbagai parpol dan kelompok kepentingan lain, yang sering memiliki agenda yang berbeda dalam mengatur jumlah dan jenis imigran yang diterima. Terakhir, institusionalisme berfokus pada bagaimana struktur dan aturan lembaga yang ada dapat memengaruhi kebijakan imigrasi, di mana proses pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh aturan yang ditetapkan dalam institusi pemerintahan.

#### **2. Teori Konteks Lokal dalam Kebijakan Imigrasi**

Teori konteks lokal dalam kebijakan keimigrasian menekankan bahwa kebijakan imigrasi tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan nasional, tetapi juga oleh konteks lokal yang melibatkan karakteristik demografi, ekonomi, dan politik di tingkat daerah (Welsh, 2022). Misalnya, daerah dengan populasi imigran yang lebih tinggi mungkin akan memiliki kebijakan yang lebih terbuka terhadap imigrasi dan mendukung integrasi sosial imigran. Sebaliknya, daerah yang memiliki sedikit imigran atau lebih konservatif dalam hal sosial dan budaya, kebijakan imigrasi mungkin lebih ketat. Karakteristik demografi, seperti tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, bisa memengaruhi sejauh mana imigran diterima dan diintegrasikan dalam masyarakat. Kondisi ekonomi, terutama di daerah yang membutuhkan banyak tenaga kerja asing, bisa mendorong kebijakan imigrasi yang lebih longgar untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Selain itu, kondisi politik lokal (pengaruh partai politik atau kebijakan yang diterapkan oleh pemimpin daerah) dapat memengaruhi apakah kebijakan imigrasi lebih pro-imigran atau lebih konservatif. Kebijakan keimigrasian harus responsif terhadap kebutuhan lokal, dan kebijakan tersebut bisa menghasilkan variasi dalam penerimaan dan integrasi imigran di berbagai daerah di Indonesia.

### 3. Kebijakan Keimigrasian di Indonesia

Indonesia menerapkan *selective policy* dalam kebijakan keimigrasian untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara, di mana hanya orang asing yang dianggap bermanfaat dan tidak membahayakan persatuan bangsa yang diizinkan masuk (Putri et al., 2021). Implementasi *selective policy* ini dilakukan melalui pemeriksaan ketat di bandara, pelabuhan, dan pos perbatasan, sehingga hanya individu yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat masuk ke wilayah Indonesia (Sianturi et al., 2021). Dalam konteks global, Indonesia juga menjadi negara transit utama bagi pengungsi internasional, meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, sehingga menghadapi tantangan besar dalam penanganan arus pengungsi yang terus meningkat. Tantangan ini semakin berat karena jumlah pengungsi yang masuk dan transit di Indonesia jauh lebih besar daripada yang berhasil direlokasi atau dipulangkan ke negara tujuan akhir mereka (Saputra et al., 2024).

Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara pengirim tenaga kerja migran terbesar di dunia, terutama di sektor pekerjaan tidak terampil, seperti ke Arab Saudi dan Malaysia (Mau, 2023). Namun, kebijakan migrasi tenaga kerja kini mulai diarahkan pada pengembangan tenaga kerja terampil, misalnya perawat yang dikirim ke negara-negara maju seperti Jerman, untuk meningkatkan daya saing dan manfaat ekonomi (Efendi et al., 2021). Perlindungan hak pekerja migran tetap menjadi isu utama, karena masih banyak pekerja yang mengalami eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia di luar negeri (Tirtosudarmo et al., 2013). Di sisi lain, kelemahan koordinasi antar-*stakeholder* dalam pengelolaan keimigrasian menjadi hambatan dalam efektivitas kebijakan, sehingga diperlukan perbaikan regulasi dan peningkatan kerja sama multilateral untuk menghadapi tantangan keimigrasian global. Dengan demikian, kebijakan keimigrasian Indonesia berupaya menyeimbangkan kepentingan nasional dengan dinamika global, tetapi masih memerlukan reformasi dan adaptasi agar lebih responsif terhadap tantangan dan peluang keimigrasian internasional (Prasetyo et al., 2024).

## **b. Teori Psikologi Sosial**

### 1. Teori Identitas Sosial

Teori identitas sosial menekankan bahwa identitas sosial, yang memberikan rasa tujuan dan kebersamaan, dapat meningkatkan ketahanan terhadap tekanan psikologis dan melindungi kesejahteraan mental, terutama pada populasi migran yang menghadapi prasangka dan pemutusan dari identitas sebelumnya selama proses integrasi di negara tujuan (Brance et al., 2024). Ketika masyarakat lokal memandang imigran sebagai kelompok yang membawa

manfaat, bukan ancaman, persepsi positif ini dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis imigran, baik secara langsung maupun melalui interaksi sosial yang lebih positif dengan penduduk mayoritas (Tartakovsky & Walsh, 2020).

## 2. Teori Adaptasi Psikologis

Teori ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara mempertahankan identitas budaya asal dan mengadopsi budaya negara tujuan. Imigran yang mampu mengembangkan identitas ganda, baik etnis maupun nasional, cenderung mengalami adaptasi psikologis yang lebih baik, meskipun proses ini sering kali penuh tantangan akibat eksklusivitas sosial dan diskriminasi (Sam, 2000). Dukungan sosial juga menjadi mediator penting. Imigran yang merasa terhubung dengan komunitas asal dan mendapatkan dukungan sosial cenderung memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih baik (Henríquez & López-López, 2022).

## 3. Integrasi Sosial dan Budaya Imigran serta Pengaruhnya terhadap Kondisi Psikologinya

Proses integrasi sosial dan budaya imigran sangat memengaruhi kondisi psikologis mereka. Integrasi yang baik di pasar kerja, seperti mendapatkan pekerjaan yang layak dan stabil, serta memiliki ikatan keluarga yang kuat di negara tujuan, terbukti menurunkan tingkat distress psikologis pada imigran. Sebaliknya, ketidakamanan kerja dan kurangnya dukungan sosial dapat meningkatkan risiko gangguan psikologis (Teixeira & Dias, 2018).

Di sisi budaya, imigran yang mampu mengintegrasikan identitas budaya asal dengan budaya negara tujuan (strategi integrasi) cenderung memiliki harga diri dan penyesuaian psikologis yang lebih baik dibandingkan mereka yang terpisah atau terpinggirkan secara budaya (Eyou et al., 2000). Proses ini juga dipengaruhi oleh persepsi imigran terhadap keolimpoknya sendiri. Jika mereka menilai kelompok imigran membawa manfaat bagi masyarakat penerima, hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis, terutama jika didukung oleh interaksi sosial yang positif dengan penduduk lokal dan sesama imigran (Tartakovsky & Walsh, 2020).

Model adaptasi budaya juga menunjukkan bahwa asimilasi dan integrasi budaya berhubungan positif dengan kepuasan hidup dan kesehatan mental imigran, terutama pada mereka yang sudah lama tinggal atau generasi kedua (Angelini et al., 2015). Namun, proses integrasi ini tidak selalu mudah, karena imigran sering menghadapi stres budaya, diskriminasi, dan tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai keluarga serta identitas budaya mereka (Bekteshi & Bellamy 2024).

### c. Penelitian Terkait:

#### 1. Policy-Related Stress and Mental Health among Immigrants in the United States (Held et al., 2025)

Penelitian ini membandingkan stres dan kesehatan mental imigran di AS pada masa pemerintahan Trump dan Biden. Hasilnya, masa pemerintahan Trump dikaitkan dengan tingkat stres, diskriminasi, dan gejala mental yang lebih tinggi. Resiliensi menjadi faktor pelindung penting terhadap dampak negatif kebijakan imigrasi yang berubah-ubah.

#### 2. Mental Health, Life Stress and Social Support among Young Norwegian Adolescents with Immigrant and Host National Background (Oppedal & Røysamb, 2004)

Penelitian di Norwegia menemukan bahwa remaja imigran melaporkan tingkat distress psikologis lebih tinggi dan dukungan sosial lebih rendah dibandingkan remaja lokal. Imigran laki-laki menunjukkan prevalensi kecemasan atau depresi tertinggi. Hal tersebut menyoroti pentingnya perbedaan gender dan budaya dalam studi kesehatan mental.

#### 3. Chronic Social Stress and Emotional Well-Being: An Analysis of Mental Health of Immigrants in Alberta (Acharya, 1998)

Penelitian ini menganalisis hubungan antara stres sosial kronis dan kesehatan mental imigran di Alberta, Kanada. Hasilnya menunjukkan bahwa usia dan pendapatan rumah tangga sangat memengaruhi tingkat stres kronis, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan mental imigran. Terdapat perbedaan indikator prediksi kesehatan mental berdasarkan asal negara imigran, baik dari negara maju maupun berkembang.

#### **4. Migration Process Experience and Its Impact on Well-Being Among Women Immigrants in Indonesia (Selian et al., 2022)**

Studi kualitatif ini meneliti pengalaman perempuan pengungsi dari Somalia, Palestina, dan Afghanistan di Indonesia. Faktor identitas, pengalaman pribadi, dan proses migrasi sangat memengaruhi kesejahteraan subjektif mereka, baik secara positif maupun negatif.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*literature review*) dengan tujuan untuk mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur ilmiah yang relevan mengenai kebijakan administrasi keimigrasian dan dampaknya terhadap psikologi sosial imigran serta masyarakat lokal di Indonesia. Data literatur dikumpulkan dari beberapa *database* akademik yang kredibel.

### **PEMBAHASAN**

#### **a. Pengaruh Kebijakan Administrasi Keimigrasian terhadap Psikologi Sosial Imigran**

Kebijakan administratif keimigrasian di Indonesia, seperti pemberian visa, peraturan izin tinggal, dan integrasi sosial, sangat memengaruhi proses adaptasi sosial dan kesejahteraan mental imigran. Studi pada mahasiswa imigran di Kalimantan menunjukkan bahwa pluralisme budaya dan keterhubungan sosial sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan prestasi mereka. Namun, persepsi diskriminasi (yang dapat dipicu oleh kebijakan administratif yang tidak ramah atau prosedur birokrasi yang rumit) dapat menurunkan pengaruh positif kesejahteraan sosial terhadap pencapaian imigran (Hm, 2021). Hal ini menandakan bahwa kebijakan yang tidak inklusif atau cenderung diskriminatif dapat memperburuk isolasi sosial dan menurunkan kesejahteraan mental.

Kebijakan imigrasi yang restriktif, seperti pembatasan visa, proses administrasi yang panjang, atau ancaman pemulangan paksa, berpotensi meningkatkan stres dan kecemasan di kalangan imigran. Studi pada pekerja migran Indonesia di Jepang menunjukkan bahwa kurangnya dukungan setelah memperoleh kualifikasi nasional dan ketidakpastian status kerja menyebabkan sekitar 22,5% pekerja berisiko mengalami masalah kesehatan mental. Faktor seperti status administratif dan ketidakpastian masa depan menjadi pemicu utama stres dan kecemasan (Sato et al., 2016). Hal ini menyoroti pentingnya sistem dukungan jangka menengah dan panjang yang responsif terhadap kebutuhan psikologis imigran.

Penelitian di Papua (Sollis et al., 2023), wilayah dengan tingkat imigrasi tinggi dan keragaman etnis, menekankan bahwa perubahan sosial akibat migrasi dapat menimbulkan ketegangan antara pendatang dan penduduk asli. Kebijakan imigrasi yang tidak memperhatikan keseimbangan sosial dapat memperbesar kesenjangan dan memicu konflik. Oleh karena itu, penting bagi kebijakan administratif untuk mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis, baik bagi imigran maupun komunitas penerima, agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau diskriminasi.

Kebijakan administratif imigrasi di Indonesia, baik yang bersifat inklusif maupun restriktif, berperan besar dalam membentuk kesejahteraan mental dan proses adaptasi sosial imigran. Kebijakan yang tidak ramah atau diskriminatif dapat meningkatkan stres, kecemasan,

dan memperburuk isolasi sosial, sedangkan kebijakan yang mendukung pluralisme budaya dan keterhubungan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan dan integrasi imigran.

#### **b. Dampak Sosial terhadap Masyarakat Lokal**

Kebijakan imigrasi yang eksklusif dapat memperkuat persepsi negatif masyarakat lokal terhadap imigran karena membatasi hak dan akses mereka dalam kehidupan sosial, sehingga menghambat integrasi dan partisipasi imigran di komunitas (Ashura, 2021). Di sisi lain, kebijakan integrasi yang inklusif terbukti menurunkan prasangka anti-imigran di masyarakat, bahkan di daerah dengan jumlah imigran yang tinggi, karena memberikan kesetaraan hak dan peluang bagi imigran untuk berkontribusi dalam masyarakat (Kende et al., 2022). Namun, pembatasan jalur legal dan akses terhadap sumber daya penting melalui kebijakan imigrasi dapat memperburuk ketegangan sosial dan menurunkan kohesi masyarakat, terutama jika imigran dipandang sebagai pesaing dalam ekonomi atau budaya (Ng'andu & Fu, 2024). Rasisme biologis dan kultural yang dipengaruhi oleh kebijakan selektif dapat meningkatkan penolakan terhadap imigran dan memperkuat diskriminasi, terutama jika masyarakat merasa terancam secara simbolik atau nyata oleh kehadiran imigran (Ramos et al., 2020).

Selain itu, kebijakan yang menonjolkan penegakan hukum atau deportasi dapat menyebabkan stres dan kecemasan pada imigran serta memperburuk hubungan dengan masyarakat lokal karena menimbulkan rasa takut dan ketidakpastian di kalangan imigran (Torres et al., 2022). Diskriminasi yang didorong oleh kebijakan administratif dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan integrasi sosial imigran sehingga memperbesar jarak sosial antara kelompok lokal dan imigran (Suárez et al., 2009). Kebijakan eksklusi juga dapat menurunkan partisipasi imigran dalam program publik dan memperburuk akses mereka terhadap layanan penting yang memperbesar kesenjangan sosial dan memperkuat ketegangan antarkelompok (Perreira & Pedroza, 2019).

#### **c. Integrasi Sosial Imigran**

Imigran di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam proses integrasi sosial, yang sebagian besar dipengaruhi oleh kebijakan imigrasi dan administrasi yang berlaku. Kebijakan kewarganegaraan yang ketat dan perbedaan budaya yang signifikan menjadi hambatan utama bagi warga negara asing untuk berbaur dengan masyarakat lokal (Nasoha et al., 2024). Kurangnya pemahaman dan interaksi antara imigran dan komunitas lokal juga memperlambat proses integrasi sehingga imigran sering kali merasa terisolasi secara sosial dan psikologis.

Kebijakan administratif yang restriktif, seperti sulitnya memperoleh izin tinggal tetap atau akses terbatas ke pendidikan dan pekerjaan, dapat menghambat imigran dalam beradaptasi dengan budaya lokal. Misalnya, imigran yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal atau pekerjaan yang layak akan kesulitan membangun jaringan sosial dan memahami norma-norma budaya setempat, sehingga memperlambat proses adaptasi mereka. Sebaliknya, di negara-negara dengan kebijakan yang lebih inklusif dan program integrasi yang terorganisir, imigran cenderung lebih mudah beradaptasi dan diterima oleh masyarakat lokal.

Studi di Papua menunjukkan bahwa meskipun imigran di wilayah dengan tingkat konflik tinggi dapat memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif baik, perubahan sosial dan ekonomi akibat migrasi dapat menimbulkan ketegangan antara pendatang dan penduduk asli (Sollis et al., 2023). Ketimpangan akses terhadap sumber daya dan layanan publik, yang sering kali dipengaruhi oleh kebijakan administratif, dapat memperbesar jarak sosial dan memicu konflik. Selain itu, migran yang mengalami hambatan integrasi sosial cenderung mengalami stres, kecemasan, dan gejala depresi, terutama jika tidak ada dukungan sosial yang memadai dari keluarga atau komunitas (Lu, 2010).

#### **d. Persepsi Masyarakat terhadap Imigran**

Kebijakan administrasi yang tidak tepat, seperti kebijakan yang bersifat eksklusif atau diskriminatif, dapat memperburuk persepsi masyarakat lokal terhadap imigran dan meningkatkan *xenofobia*, karena kebijakan tersebut memperkuat batas-batas sosial dan menandai imigran sebagai kelompok yang berbeda atau tidak diinginkan (Samari et al., 2021). Misalnya, kebijakan yang membatasi akses imigran terhadap layanan publik atau perumahan dapat digunakan untuk mengirim sinyal politik bahwa imigran tidak layak mendapatkan hak yang sama sehingga memperkuat sentimen anti-imigran di kalangan masyarakat lokal (Allen & Goetz, 2020). Selain itu, beban administratif yang berlebihan dan kebijakan yang tidak transparan dapat menciptakan hambatan integrasi, memperkuat diskriminasi rasial, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem administrasi, yang pada akhirnya memperburuk hubungan antara masyarakat lokal dan imigran (Heinrich, 2018). Sebaliknya, perubahan kebijakan ke arah yang lebih pemberian informasi yang akurat tentang karakteristik imigran, bukan hanya jumlahnya, dapat memperbaiki sikap masyarakat lokal terhadap imigran, terutama di kelompok yang awalnya memiliki pandangan negatif (Grigorieff, 2020).

Pendidikan yang lebih tinggi terbukti secara kausal dalam meningkatkan sikap positif terhadap imigran dengan mengubah nilai dan penilaian kognitif individu terhadap peran imigran dalam masyarakat (d'Hombres & Nunziata, 2016). Kebijakan pendidikan yang inklusif dan mendukung integrasi imigran di sekolah dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan mengurangi eksklusi sosial di kalangan remaja berlatar belakang imigran (Ham et al., 2017). Akses terhadap informasi melalui internet juga dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat lokal terhadap ancaman budaya dari imigran, terutama jika informasi yang dikonsumsi bersifat netral atau positif (Xia, 2024).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kebijakan administrasi keimigrasian di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan psikologis dan integrasi sosial imigran. Kebijakan yang inklusif dan mendukung akses pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan hukum dapat memperkuat rasa aman dan meningkatkan kesehatan mental imigran. Sebaliknya, kebijakan yang bersifat restriktif atau diskriminatif berpotensi menimbulkan stres, kecemasan, serta isolasi sosial yang memperburuk proses adaptasi imigran. Selain itu, dinamika sosial antara imigran dan masyarakat lokal sangat dipengaruhi oleh kebijakan tersebut, di mana kebijakan eksklusif cenderung memperkuat prasangka dan ketegangan sosial, sedangkan kebijakan inklusif mendorong harmoni dan penerimaan budaya.

Meskipun demikian, masih terdapat berbagai hambatan dalam proses integrasi sosial imigran di Indonesia, khususnya terkait akses izin tinggal dan kesempatan kerja yang berdampak pada kesehatan mental mereka. Oleh karena itu, kebijakan keimigrasian perlu diperbaiki agar lebih responsif terhadap kebutuhan psikososial imigran dan konteks sosial lokal guna menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif.

### **Saran**

Pemerintah diharapkan dapat mengembangkan kebijakan keimigrasian yang lebih inklusif dengan memberikan kemudahan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum bagi imigran untuk memperkuat integrasi sosial serta mengurangi tekanan psikologis. Koordinasi yang lebih baik antar institusi terkait pengelolaan imigrasi perlu ditingkatkan agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan tidak diskriminatif. Selain itu, program-program yang mendorong interaksi positif antara imigran dan masyarakat lokal harus

diinisiasi guna memperkuat kohesi sosial dan mengurangi prasangka negatif, misalnya melalui edukasi dan kampanye anti diskriminasi. Penyediaan layanan dukungan psikososial bagi imigran yang terdampak kebijakan restriktif juga sangat penting. Selain itu, penyebaran informasi yang akurat dan transparan mengenai kebijakan keimigrasian kepada masyarakat luas perlu ditingkatkan agar penerimaan sosial terhadap imigran semakin baik, serta mendorong penelitian lanjutan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal yang beragam.

## REFERENSI

- Hugo, G. (2006). Forced Migration in Indonesia: Historical Perspectives. *Asian and Pacific Migration Journal*, 15, 53 - 92. <https://doi.org/10.1177/011719680601500104>.
- Allen, R., & Goetz, E. (2020). A home for xenophobia: U.S. public housing policy under Trump. *International Journal of Housing Policy*, 21, 127 - 137. <https://doi.org/10.1080/19491247.2020.1803533>.
- Xia, S. (2024). Knowing More, Worrying Less? Internet Use Eases Public Concern about Immigrant Cultural Threat. *Technology in Society*. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2024.102591>.
- Ham, S., Yang, K., & Cha, Y. (2017). Immigrant integration policy for future generations? A cross-national multilevel analysis of immigrant-background adolescents' sense of belonging at school. *International Journal of Intercultural Relations*, 60, 40-50. <https://doi.org/10.1016/J.IJINTREL.2017.06.001>.
- d'Hombres, B., & Nunziata, L. (2016). Wish you were here? Quasi-experimental evidence on the effect of education on self-reported attitude toward immigrants☆. *European Economic Review*, 90, 201-224. <https://doi.org/10.1016/J.EUROCOREV.2016.02.007>.
- Heinrich, C. (2018). Presidential Address: "A Thousand Petty Fortresses": Administrative Burden in U.S. Immigration Policies and Its Consequences. *Journal of Policy Analysis and Management*, 37, 211-239. <https://doi.org/10.1002/PAM.22046>.
- Held, M., Zuch, M., & Galvez, E. (2025). Policy-Related Stress and Mental Health among Immigrants in the United States. *Journal of International Migration and Integration*. <https://doi.org/10.1007/s12134-025-01233-5>.
- Grigorieff, A., Roth, C., & Ubfal, D. (2020). Does Information Change Attitudes Toward Immigrants?. *Demography*, 57, 1117-1143. <https://doi.org/10.1007/s13524-020-00882-8>.
- Samari, G., Nagle, A., & Coleman-Minahan, K. (2021). Measuring structural xenophobia: US State immigration policy climates over ten years. *SSM - Population Health*, 16. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100938>.
- Agudelo-Suárez, A., Gil-González, D., Ronda-Pérez, E., Porthé, V., Paramio-Pérez, G., García, A., & Garí, A. (2009). Discrimination, work and health in immigrant populations in Spain.. *Social science & medicine*, 68 10, 1866-74 . <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.02.046>.
- Nasoha, A., Febriyanti, A., Mutmainah, K., Abdalla, M., & Devi, R. (2024). Kewarganegaraan dalam Tinjauan Sosial : Integrasi Sosial Warga Negara Asing di Indonesia. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i4.607>.
- Perreira, K., & Pedroza, J. (2019). Policies of Exclusion: Implications for the Health of Immigrants and Their Children.. *Annual review of public health*, 40, 147-166 . <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-040218-044115>.
- Ng'andu, J., & Fu, C. (2024). The Intergenerational Effects From Structural Racism Cost Our Society Greatly.. *Academic pediatrics*, 24 5S, 46-47 .

- <https://doi.org/10.1016/j.acap.2023.03.012>.
- Sollis, K., Resosudarmo, B., Witoelar, F., Riswandi, R., & Mollet, J. (2023). Migrant Status and the Wellbeing Gap: The Case of an Ethnically Diverse, High-Conflict Area in Indonesia. *Journal of Happiness Studies*, 24, 1781-1811. <https://doi.org/10.1007/s10902-023-00659-x>.
- Sato, F., Hayakawa, K., & Kamide, K. (2016). Investigation of mental health in Indonesian health workers immigrating to Japan under the Economic Partnership Agreement.. *Nursing & health sciences*, 18 3, 342-9 . <https://doi.org/10.1111/nhs.12275>.
- Kende, J., Sarrasin, O., Manatschal, A., Phalet, K., & Green, E. (2022). Policies and prejudice: Integration policies moderate the link between immigrant presence and anti-immigrant prejudice.. *Journal of personality and social psychology*. <https://doi.org/10.1037/pspi0000376>.
- Lu, Y. (2010). Mental health and risk behaviours of rural–urban migrants: Longitudinal evidence from Indonesia. *Population Studies*, 64, 147 - 163. <https://doi.org/10.1080/00324721003734100>.
- Ramos, A., Pereira, C., & Vala, J. (2020). The impact of biological and cultural racisms on attitudes towards immigrants and immigration public policies. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 46, 574 - 592. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1550153>.
- Hm, A. (2021). Cultural Pluralism and Social Connectedness as Predictors of Immigrant Students' Social Wellbeing and Achievements. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*. <https://doi.org/10.29333/EJECS/917>.
- Acharya, M. (1998). Chronic Social Stress and Emotional Well-Being: An Analysis of Mental Health of Immigrants in Alberta. *Canadian Studies in Population*, 25, 1-27. <https://doi.org/10.25336/P66017>.
- Oppedal, B., & Røysamb, E. (2004). Mental health, life stress and social support among young Norwegian adolescents with immigrant and host national background.. *Scandinavian journal of psychology*, 45 2, 131-44 . <https://doi.org/10.1111/J.1467-9450.2004.00388.X>.
- Bayu Setyaji, T., Arief Fakrulloh, Z., & Suparno, S. (2023). Implementation of Legal Policy in Indonesia in Handling Illegal Immigrants. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 4(05), 417–424. <https://doi.org/10.59141/jiss.v4i05.813>
- Torres, S., Sosa, S., Toussaint, R., Jolie, S., & Bustos, Y. (2022). Systems of Oppression: The Impact of Discrimination on Latinx Immigrant Adolescents' Well-Being and Development. *Journal of Research on Adolescence*, 32, 501 - 517. <https://doi.org/10.1111/jora.12751>.
- Eyou, M., Adair, V., & Dixon, R. (2000). Cultural identity and psychological adjustment of adolescent Chinese immigrants in New Zealand.. *Journal of adolescence*, 23 5, 531-43 . <https://doi.org/10.1006/JADO.2000.0341>.
- Angelini, V., Casi, L., & Corazzini, L. (2015). Life satisfaction of immigrants: does cultural assimilation matter?. *Journal of Population Economics*, 28, 817 - 844. <https://doi.org/10.1007/s00148-015-0552-1>.
- Prasetyo, T., & Nugraha, P. (2024). Managing Immigration to Support National Interests: Indonesia's Strategies and Efforts. *Jurnal Lemhannas RI*. <https://doi.org/10.55960/jlri.v12i2.981>.
- Bekteshi, V., & Bellamy, J. (2024). Adapting for Well-Being: Examining Acculturation Strategies and Mental Health among Latina Immigrants. *Social Sciences*. <https://doi.org/10.3390/socsci13030138>.
- Tartakovsky, E., & Walsh, S. (2020). Factors affecting the psychological well-being of

- immigrants: The role of group self-appraisal, social contacts, and perceived ethnic density.. *Cultural diversity & ethnic minority psychology*. <https://doi.org/10.1037/cdp0000333>.
- Henríquez, D., Urzúa, A., & López-López, W. (2022). Social Support as a Mediator of the Relationship between Identity Fusion and Psychological Well-Being in South—South Migrant Populations. *Journal of International Migration and Integration*, 1 - 23. <https://doi.org/10.1007/s12134-022-00996-5>.
- Sam, D. (2000). Psychological Adaptation of Adolescents With Immigrant Backgrounds. *The Journal of Social Psychology*, 140, 25 - 5. <https://doi.org/10.1080/00224540009600442>.
- Dani, A. (2020). PENGAWASAN ORANG ASING MENURUT UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN DI INDONESIA. *Solusi*. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i3.307>.
- Selian, S., Khalefa, E., & Hanifah, L. (2022). Migration process experience and its impact on well-being among women immigrants in Indonesia. *Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi*. <https://doi.org/10.21580/pjpp.v7i2.12596>.
- Teixeira, A., & Dias, S. (2018). Labor market integration, immigration experience, and psychological distress in a multi-ethnic sample of immigrants residing in Portugal. *Ethnicity & Health*, 23, 81 - 96. <https://doi.org/10.1080/13557858.2016.1246421>.
- Bakker, F., & Mirwanto, T. (2021). CONTRIBUTION OF THE ROLE OF INDONESIAN IMMIGRATION IN PREVENTING AND PROTECTING HUMAN RIGHTS AGAINST NON-PROCEDURAL MIGRANT WORKERS (PMI-NP) FROM TRANSNATIONAL CRIMES. *Journal of Law and Border Protection*. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v3i1.208>.
- Sianturi, B., & Utami, D. (2021). IMMIGRATION EXAMINATION IN IMMIGRATION CHECKPOINT AS AN IMPROVEMENT OF INDONESIAN'S SOCIETY WELFARE. *Journal of Law and Border Protection*. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v3i1.207>.
- Akbar, P. (2016). The Authority of the Class II Immigration Office in the Implementation of Foreigners Residence Permit in the Territory of Indonesia Based on Law Number 6 of 2011 on Immigration Policy in Conjunction with Selective Policy Principles. , 341-346. <https://doi.org/10.29313/V0I0.2723>.
- Sablonnière, R., Nugier, A., Kadhim, N., Kleinlogel, E., Pelletier-Dumas, M., & Guimond, S. (2020). The impact of national integration policies on prejudice and psychological well-being: The fundamental role of the clarity and coherence of integration policies. *European Journal of Social Psychology*, 50, 614-633. <https://doi.org/10.1002/ejsp.2647>.
- Ashura, C. (2021). The Effects of Immigration and Refugee Policies on Social Integration and Community. *Journal of Public Representative and Society Provision*. <https://doi.org/10.55885/jprsp.v1i3.240>.
- Torres, S., Santiago, C., Walts, K., & Richards, M. (2018). Immigration Policy, Practices, and Procedures: The Impact on the Mental Health of Mexican and Central American Youth and Families. *American Psychologist*, 73, 843–854. <https://doi.org/10.1037/amp0000184>.
- Meyers, E. (2000). Theories of International Immigration Policy — A Comparative Analysis 1. *International Migration Review*, 34, 1245 - 1282. <https://doi.org/10.1177/019791830003400407>.
- Khan-Welsh, H., Reese, L., & Reese, T. (2022). How Local Contexts Matter for Local Immigrant Policies. *Urban Affairs Review*, 59, 1160 - 1213. <https://doi.org/10.1177/10780874221091496>.
- Syakir, S. (2020). Policy of Permission of Permit To Exit Indonesia's Region In Immigration

- Perspective. *Journal of Sosial Science*. <https://doi.org/10.46799/JSSS.V11I4.50>.
- Saputra, F., Zulfa, E., & Riyanta, S. (2024). Indonesia as a Transit State in Handling Overseas Refugees from the Aspect of Immigration Policy. *Journal Transnational Universal Studies*. <https://doi.org/10.58631/jtus.v2i5.104>.
- Dewansyah, B., Negara, D., Hukum, F., & Barat, J. (2015). The Development of Legal Policy and Legal Needs of Indonesian Immigration Law: Answered Partially, Forget the Rest.
- Putri, E., Sari, M., & Hamdi, M. (2021). OPTIMIZATION OF IMMIGRATION FUNCTIONS ON HUMAN TRAFFICKING THROUGH SELECTIVE POLICY. *Journal of Law and Border Protection*. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v3i2.276>.
- Mau, A. (2023). A Comparative Study of International Skilled Workers Migration: Challenges and Opportunities for Indonesia.
- Efendi, F., Haryanto, J., Indarwati, R., Kuswanto, H., Ulfiana, E., Has, E., & Chong, M. (2021). Going Global: Insights of Indonesian Policymakers on International Migration of Nurses. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 14, 3285 - 3293. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S327962>.
- Tirtosudarmo, R., & Mulyani, L. (2013). INDONESIA'S MIGRANT WORKERS AND OVERSEAS LABOR POLICY. , 15, 49-70. <https://doi.org/10.14203/JMB.V15I1.141>.
- Brance, K., Chatzimpyros, V., & Bentall, R. (2024). Social identity, mental health and the experience of migration.. *The British journal of social psychology*. <https://doi.org/10.1111/bjso.12745>.